

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat memberikan jaminan sosial yang menyeluruh kepada rakyat, maka pemerintah mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem ini bertujuan untuk memberikan jaminan berkelanjutan terhadap peserta dan/atau anggota keluarganya atas resiko sosial ekonomi yang menimpa seperti sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun (UU Nomor 40, 2004).

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa pemberi kerja atau badan usaha wajib melindungi dan mendaftarkan dirinya serta tenaga kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Agar mendapatkan haknya, pemberi kerja maupun tenaga kerja wajib membayar iuran yang menjadi kewajibannya terhadap lembaga penyelenggara program jaminan sosial. Dengan demikian maka hak untuk mendapatkan perlindungan akan terus berjalan (UU Nomor 40, 2004).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS sebagai badan hukum yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, serta memiliki kewenangan untuk dapat memberikan sanksi kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya (UU Nomor 24, 2011).

Iuran pada setiap program BPJS Ketenagakerjaan memiliki jumlah yang berbeda sesuai dengan upah dan segmentasi kepesertaan yang diikuti. Pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan jatuh tempo pada tanggal 15 setiap bulannya. Jika setelah tanggal tersebut pada bulan berikutnya perusahaan atau peserta belum membayar sebagian atau seluruh iuran, maka akan timbul piutang bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan. Piutang tersebut dapat berdampak terhadap jaminan yang akan diterima oleh peserta.

Banyaknya badan usaha yang mendaftarkan dirinya menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan membuat piutang iuran semakin bertambah. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan menerapkan prosedur penagihan piutang iuran yang ditangani langsung oleh bagian penagih yang ada di perusahaan. Penyelesaian piutang iuran dianggap berhasil ketika badan usaha yang berhutang telah menyelesaikan pembayaran hutang iuran sepenuhnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat permasalahan yang terjadi di atas mengenai adanya piutang atau tunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan, maka guna meminimalisasi piutang yang ada diperlukan adanya prosedur penagihan yang sesuai. Dengan demikian, penulis tertarik menulis Tugas Akhir dengan judul “Analisis Prosedur Penagihan Piutang Iuran Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Purwokerto”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan piutang iuran pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto.

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan

- a) Untuk memahami dan mengetahui secara langsung bagaimana prosedur penagihan piutang iuran pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto.
- b) Untuk mengetahui apakah alur penagihan piutang iuran pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

- a) Untuk mendapat pengalaman di bidang kerja terlebih tentang kegiatan penagihan piutang iurang pada BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto.

- b) Untuk memperluas pengetahuan tentang tugas kerja tiap-tiap bidang pekerjaan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto melalui latihan kerja.
- c) Sebagai gambaran nyata penerapan ilmu akuntansi pada lingkup dunia kerja.

3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

a) Manfaat bagi Mahasiswa

Untuk mendapatkan pengalaman kerja serta menambah wawasan dan relasi di dunia kerja, membuka peluang mahasiswa untuk dapat bekerja di instansi yang dijadikan tempat Praktik Kerja Lapangan dan sebagai bahan penyusunan Tugas Akhir.

b) Manfaat bagi Instansi

Hasil penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan penagihan piutang iuran pada BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto.

c) Manfaat bagi Pihak Akademis

Menjadi salah satu cara untuk melatih mahasiswa dan persiapan bagi mahasiswa agar kompeten di bidangnya serta mampu bertahan dalam persaingan dunia kerja.

D. Pembatasan Masalah

Mengingat pada latar belakang serta identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah agar penulisan tugas akhir ini lebih fokus dan terarah. Mengingat penulis memiliki keterbatasan waktu dalam pengumpulan data dan

informasi, maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada Prosedur Penagihan Piutang Iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Purwokerto.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penelitiannya. Metode pengumpulan data serta sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat praktik kerja lapangan yaitu Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto. Data primer dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a) Metode Interview

Dilakukan dengan cara mewawancarai langsung beberapa pegawai BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto tentang beberapa hal yang kaitannya dengan Prosedur Penagihan Piutang Iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Purwokerto.

b) Metode Observasi

Diperoleh dengan cara mencari sumber-sumber pendukung laporan praktik kerja lapangan. Data ini diperoleh dari data-data yang berhubungan dengan Prosedur Penagihan Piutang Iuran pada

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Purwokerto.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada yang digunakan sebagai tambahan yang mendukung dalam penyusunan laporan tugas akhir. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a) Dokumentasi

Diperoleh dengan cara mencatat data-data yang ada, serta diperoleh dari arsip dokumen yang berhubungan dengan Prosedur Penagihan Piutang Iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Purwokerto.

b) Studi Pustaka

Diperoleh dari buku-buku milik BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto yang ada kaitannya dengan Prosedur Penagihan Piutang Iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Purwokerto.

E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1
Jadwal Praktik Kerja Lapangan

No	Keterangan	Januari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAHAP PERSIAPAN													
1.	Observasi ke tempat praktik kerja lapangan	√											
2.	Meminta surat pengantar dari fakultas	√											
3.	Konfirmasi persetujuan dan izin dari tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan				√								
TAHAP PELAKSANAAN													
4.	Pelaksanaan praktik kerja lapangan					√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Melakukan wawancara kepada beberapa karyawan							√	√	√	√	√	√
6.	Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing					√	√	√	√	√	√	√	√
7.	Mengajukan judul tugas akhir											√	
TAHAP PELAPORAN													
10.	Meminta izin untuk melihat beberapa dokumen untuk dianalisis dan dipelajari					√	√	√					
11.	Menyusun laporan tugas akhir								√	√	√	√	√